



Sekretariat DPRD
Kota Semarang

RENCANA KERJA

Sekretariat DPRD Kota Semarang

Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 ini dapat tersusun.

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang dengan disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan RKA sebelum disahkan menjadi DPA Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

Kami menyadari Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, Desember 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG



MOCH IMRON, SH., MH.
Pembina Utama Muda/ (IV-c)
NIP.196701101986031003

DAFTAR ISI

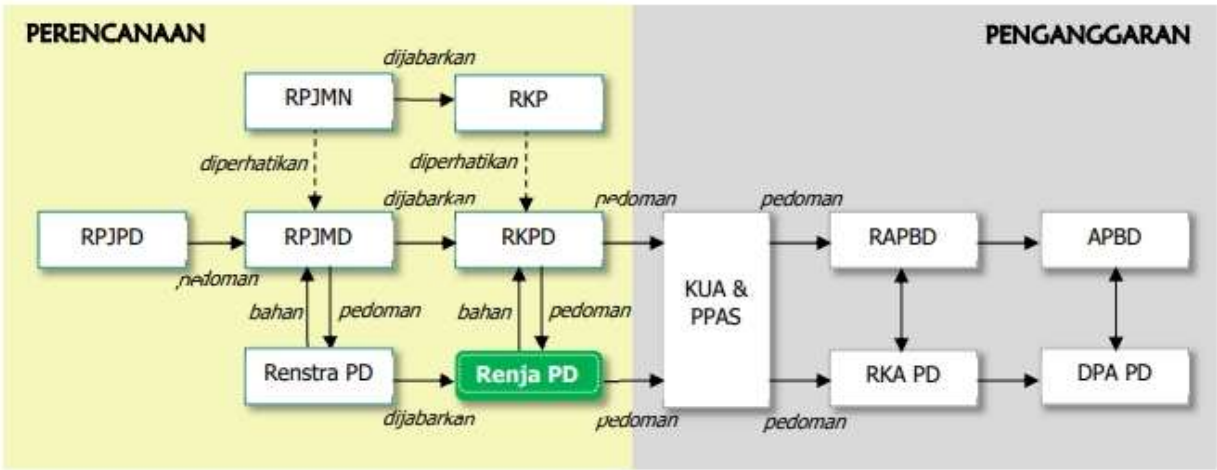
JUDUL.....	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. LATAR BELAKANG.....	1	
1.2. LANDASAN HUKUM	2	
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4	
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU		
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang	6	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPR ²²		
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	27	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG		
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	56	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD	58	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPRD KOTA SEMARANG.....		60
4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....	60	
BAB V PENUTUP		
5.1. Catatan Penting.....	81	
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	81	
5.3. Rencana Tindak Lanjut	81	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026.

Selanjutnya Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun

2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD; analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD; review terhadap Rancangan awal RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat DPRD sampai tahun 2025, yang menggunakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2021 – 2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021 -2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021 – 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai tahun 2025 tersaji dalam tabel dibawah ini

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

[illegible]

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.02.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
4.02.02.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	94,43%	94,43%	100%	100%	100%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	90	90%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%	75	75%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%			100%	100%	100%
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100	100%	100%	100%
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	100%	100%	97,31%	97,31%	100%	100%	100%
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN terbayar	100%	100%	100%	97,88%	97,88%	47 orang	47 orang	100%
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminsitasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	86,07%	86,07%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	-	100%	49,93%	49,93%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan Semesteran SKPD	6 laporan	-	100%	98,16%	98,16%	6 Laporan	6 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah Terlindungi	100%	-	100%	74,88%	74,88%	100%	100%	100%
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 kendaraan	-	100%	74,88%	74,88%	7 dokumen	7 dokumen	100%
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	-	100%	72,97%	72,97%	100%	100%	100%
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang mengikuti Bintek Implementasi PerUUan	100%	100%	100%	72,97%	72,97%	47 orang	47 orang	100%
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	88,61%	88,61%	100%	100%	100%
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	99,26%	99,26%	3 Paket	3 Paket	100%
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan	100%	100%	100%	94,39%	94,39%	7 Paket	7 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	100%	100%	100%	87,39%	87,39%	12 Paket	12 Paket	100%
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	100%	76,98%	76,98%	6 Paket	6 paket	100%
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bhn Bacaan dan PerUUan yang disediakan	100%	100%	100%	88,32%	88,32%	1 dokumen	1 dokumen	100%
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	99,53%	99,53%	12 laporan	12 laporan	100%
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	100%	100%	100%	68,09%	68,09%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	90,13%	90,13%	100%	100%	100%
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	100%	100%	88,79%	88,79%	4 unit	4 unit	100%
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	100%	100%	100%	94,15%	94,15%	55 Unit	55 Unit	100%
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	93,37%	93,37%	25 unit	25 unit	100%
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	100%	100%	100%	96,99%	96,99%	100%	100%	100%
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	100%	100%	99,92%	99,92%	1 laporan	1 laporan	100%
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang disediakan	100%	100%	100%	54,98%	54,98%	12 Laporan	12 Laporan	100%
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	100%	100%	99,83%	99,83%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Tahun Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sd Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Program dan Kegiatan sd Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	76,51%	76,51%	100%	100%	100%
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	100%	100%	100%	63,92%	63,92%	52 unit	52 unit	100%
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	69,11%	69,11%	248 unit	248 unit	100%
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/ Direhabilitasi	100%	100%	100%	94,01%	94,01%	2 Unit	2 Unit	100%
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung lkantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	100%	100%	91,68%	91,68%	100 Unit	100 unit	100%
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%	100%	100%	92,27%	92,27%	100%	100%	100%
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	100%	100%	100%	92,55%	92,55%	50 orang	50 orang	100%
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Pakaian Dinas DPRD	100%	100%	100%	80,93%	80,93%	6 Paket	6 Paket	100%
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%	75.86%	75.86%	100%	100%	100%
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang tersedia	100%	100%	100%	75.86%	75.86%	4 Paket	4 Paket	100%

Dari data sebagaimana pada tabel 2.1 diatas, Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang melaksanakan 2 program, 13 kegiatan dan 40 Sub kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a. Target capaian indikator persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100%. Realisasi indikator kinerja program diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD sebanyak 8 dokumen telah terpenuhi.
- b. Target Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Indikator capaian sudah berjalan dengan baik yaitu kegiatan rekon keuangan dengan BPKAD.
- c. Target persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD sebanyak 100% dapat terealisasi 100% hal tersebut dapat di ukur dari jumlah target kegiatan yang di kontrakan berbanding realisasi kontrak yang sudah selesai.
- d. Target persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD sebesar 100% dapat terealisasi 100%. Hal tersebut dapat dijabarkan melalui jumlah diklat yang sudah diikuti oleh pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD kota sebanyak 40 pegawai.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 8 Raperda dari 15 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan Sekretariat DPRD dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.870.692.792	68.441.582.885	91,41%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.424.800	73.014.100	88,58%
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.063.200	38.373.600	98,23%
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.033.800	2.977.500	98,14%
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.033.800	2.930.000	96,58%
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.316.600	105.000	1,26%
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.033.800	2.979.800	98,22%
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.033.800	2.975.400	98,08%
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	22.909.800	22.672.800	98,97%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.620.670.210	7.415.692.602	97,31%
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.255.195.000	7.101.358.102	97,88%
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.095.610	312.507.500	86,07%
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.055.000	526.800	49,93%
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.324.600	1.300.200	98,16%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70.000.000	52.412.500	74,88%
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	70.000.000	52.412.500	74,88%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	723.000.000	527.603.000	72,97%
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	723.000.000	527.603.000	72,97%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.968.756.171	5.288.766.467	88,61%
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000	109.184.160	99,26%
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	407.327.845	384.482.052	94,39%
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.413.980	413.697.213	87,39%
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	427.664.450	329.211.000	76,98%
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	241.792.596	213.554.077	88,32%
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.877.987.240	2.864.533.560	99,53%
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.430.570.060	974.104.405	68,09%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.479.776.412	4.037.677.000	90,13%
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.293.655.428	2.924.440.000	88,79%
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	732.076.596	689.280.000	94,15%
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	454.044.388	423.957.000	93,37%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.634.555.949	2.555.173.466	96,99%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.477.693	22.460.000	99,92%
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.162.256	91.913.466	54,98%
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.444.916.000	2.440.800.000	99,83%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.344.516.110	1.793.723.397	76,51%
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.063.500.000	679.758.462	63,92%
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	333.577.247	230.535.450	69,11%
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	636.649.000	598.511.945	94,01%
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	310.789.863	284.917.540	91,68%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	49.058.493.140	45.264.996.872	92,27%
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	47.879.959.000	44.311.161.872	92,55%
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.178.534.140	953.835.000	80,93%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.888.500.000	1.432.523.481	75,86%
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.888.500.000	1.432.523.481	75,86%
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	60.335.866.803	36.577.940.814	60,62%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	12.362.909.600	7.256.182.899	58,69%
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12.362.909.600	7.256.182.899	58,69%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2024	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.954.230.412	10.093.734.682	67,50%
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.012.741.218	958.465.520	94,64%
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11.065.856.610	6.773.097.525	61,21%
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.875.632.584	2.362.171.637	82,14%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.201.587.411	4.713.838.762	90,62%
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	5.201.587.411	4.713.838.762	90,62%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	27.817.139.380	14.514.184.471	52,18%
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24.886.459.955	12.410.626.231	49,87%
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.930.679.425	2.103.558.240	71,78%
Sekretariat DPRD		135.206.559.595	105.019.523.699	77,67%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada APBD Perubahan Tahun 2024, aspek dukungan dana yang digunakan untuk membiayai 2 program dan 13 kegiatan serta 40 Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp135.206.559.595. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp105.019.523.699 atau setara 77,67% . Terdapat sisa anggaran sebesar Rp30.187.035.896 atau setara 22.33%. Sisa Anggaran tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain :

- a. Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar;
- b. Efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyesuaikan kegiatan Anggota Dewan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota

Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi
		2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Tujuan								
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang	Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda	85%	90%	91%	93%	84.83%	87.51%	88.81%
Sasaran								
Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan	Persentase Raperda menjadi Perda	76.47 %	82.35 %	88.24 %	94.12 %	53.3%	62.50%	88.50%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	79.94	81	82	85	73.86	74.80	79.50

Adapun hasil analisis dari pencapaian Realisasi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Presentase Pembentukan Perda dan Pengawasan Pelaksanaan Perda”. Dari Target yang ditentukan sebesar 100, Sekretariat DPRD dapat terrealisasikan sebesar 77,67%;
- b. Terdapat 2 Sasaran yang ditetapkan
 - 1) “Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan” memiliki 1 indikator kinerja Persentase Raperda menjadi Perda
 - 2) “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja Nilai SAKIP OPD.

Disamping hal-hal tersebut di atas, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang terhadap Tugas dan Fungsi dalam memberikan pelayanan Kepada DPRD Kota Semarang dalam pengadministrasian Produk Hukum DPRD Kota Semarang pada tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. PERATURAN DPRD KOTA SEMARANG

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor I Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

2. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SEMARANG:

- a. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah
- b. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/5 Tahun 2024 tentang persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
- c. Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/6 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 Menjadi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045.

2. KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG :

- a. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/1 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Semarang Akhir tahun Anggaran 2023
- b. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/2 Tahun 2024 tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun Anggaran 2023
- c. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025 – 2045
- d. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/8 Tahun 2024 tentang Keputusan Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang

- e. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/9 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penarikan Kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Biaya Layanan Pengelolaan Sampah
- f. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/12 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Semarang Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- g. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/13 Tahun 2024 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
- h. Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/20 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang

3. PERATURAN DAERAH:

- a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
- c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2024 - 2054;
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- h. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan

4. KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

- a. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/82 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
- b. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/94 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pimpinan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
- c. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/98 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024 - 2029
- d. Keputusan Sekretaris DPRD No 100.1.4/99 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran Dan Badan Kehormatan Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Jabatan 2024-2029
- e. Keputusan Sekretaris DPRD No 000.5/31/2 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Arsip Dinamis Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang

Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Sekretariat DPRD Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut :

Dari 2 program, 13 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semaang di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 2 program (100,00 %), 6 kegiatan (46,15 %) dan 20 sub kegiatan (50,00 %).

Dari jumlah tersebut, total anggaran dari sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp 50.344.279.131,- (37,24 %). Adapun anggaran dari sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS adalah sebesar Rp 37.602.976.908,- (27,81 %).

Masih terkait pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang, beberapa Inovasi yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Pemanfaatan sosial media dalam penyebarluasan informasi DPRD Kota Semarang

Secara rutin DPRD Kota Semarang menyapa masyarakat lewat media cetak, media online, radio, dan televisi. Dalam beberapa kesempatan tersebut, DPRD Kota Semarang mengangkat issue yang sedang hangat di masyarakat. Misalnya permasalahan Pendidikan, Kesehatan dan Pemahanan

terhadap fungsi Legislatif. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

2. JDIH Sekretariat DPRD

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dalam laman ini memuat informasi terkait dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Peraturan DPRD yang dapat diakses pada alamat <https://jdihdprd.semarangkota.go.id>

Pada bulan Juli Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Semarang memperoleh penghargaan sebagai Terbaik Kedua Tingkat Jawa Tengah dalam Lomba Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum) yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purn Drs. Nana Sudjana, A.S didampingi oleh Kepala Pusat JDIHN Kementerian Hukum dan HAM RI, Jonny P. Simamora kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang Moch Imron, S.H., M.H.

3. Dhayoh-e

Dhayoh-e merupakan Aplikasi yang dibuat Sebagai Media Komunikasi Digital DPRD Kota Semarang dengan DPRD Kabupaten / Kota Dan Instansi pemerintah Se Indonesia. Tentunya hal ini memudahkan dalam mengatur dan mengetahui kehadiran tamu yang akan berkunjung ke DPRD Kota Semarang secara sistematis

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak terlepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis baik di Lingkup internal DPRD Kota Semarang maupun dampak dari Keputusan Partai Politik di tingkat Nasional. Tahun 2024 merupakan tahun politik dengan agenda besar Pemilihan

Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD menghadapi tantangan utama untuk:

1. Netralitas ASN Sekretariat DPRD

Menjaga netralitas ASN di tengah aktivitas politik anggota DPRD.

Menghindari konflik kepentingan antara tugas administratif dengan dinamika politik fraksi.

Memastikan setiap dukungan kegiatan DPRD bersifat non-partisan dan berorientasi pada kepentingan kelembagaan.

2. Profesionalitas dalam Mendukung Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD memiliki peran supporting system terhadap tiga fungsi utama DPRD:

- a. legislasi,
- b. anggaran, dan
- c. pengawasan.

Dalam situasi politik yang intens, diperlukan penegasan batas profesionalitas, yakni:

- Membedakan antara dukungan administratif dan kegiatan politis anggota DPRD.
- Menegakkan standar operasional prosedur (SOP) yang berbasis etika birokrasi dan regulasi netralitas ASN (Permenpan-RB No. 7 Tahun 2021).

3. Manajemen Komunikasi dan Informasi Publik

Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap kegiatan DPRD selama tahun politik:

- a. Sekretariat harus memastikan transparansi informasi publik tanpa membuka ruang manipulasi informasi.
- b. Pengelolaan media sosial dan website DPRD perlu diatur agar tidak menjadi alat kampanye terselubung.
- c. Diperlukan pedoman komunikasi resmi dalam menghadapi isu-isu sensitif politik lokal.

4. Tata Kelola Administrasi dan Keuangan di Masa Politik

Potensi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan yang bersinggungan dengan politik perlu diantisipasi. Fokusnya:

- a. Penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
- b. Pengawasan ketat terhadap belanja perjalanan dinas, kegiatan reses, dan sosialisasi agar tidak digunakan untuk kepentingan elektoral.
- c. Optimalisasi peran PPK dan Bendahara Sekretariat DPRD dalam menjaga integritas keuangan.

5. Kesiapan dan Kapasitas SDM

Tahun politik menuntut:

- a. SDM yang tanggap terhadap dinamika politik namun tetap profesional.
- b. Penguatan kapasitas ASN melalui pelatihan etika netralitas dan komunikasi politik birokrasi.
- c. Penataan ulang pembagian tugas dan beban kerja agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas ahli diantaranya :

1. Putusan Mahkamah Agung terkait dengan Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 oleh Mahkamah Agung membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal standar harga satuan regional. Salah satu dampak paling nyata dari putusan tersebut adalah diberlakukannya kembali sistem pembayaran perjalanan dinas dengan skema at cost, menggantikan metode lumpsum bagi Anggota DPRD yang sebelumnya diterapkan.

Perubahan ini menuntut setiap pelaksanaan perjalanan dinas untuk didasarkan pada bukti pengeluaran riil, bukan lagi berdasarkan nilai satuan tetap. Bagi Sekretariat DPRD, khususnya Setwan Kota Semarang, kebijakan ini menimbulkan penyesuaian administratif dan teknis yang cukup besar dalam proses pertanggungjawaban keuangan. Realisasi anggaran yang sebelumnya dapat tercapai lebih cepat melalui sistem lumpsum kini mengalami perlambatan akibat verifikasi dan pencocokan bukti pengeluaran yang lebih ketat.

Di sisi lain, kebijakan ini juga mendorong peningkatan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran karena setiap rupiah pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, meskipun berdampak pada penurunan capaian realisasi anggaran dalam jangka pendek, keputusan Mahkamah Agung tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel dalam jangka panjang.

2. Pergantian Masa Jabatan Anggota DPRD 2019-2024 ke 2024-2029

Tahun 2024 merupakan tahun pertama bagi anggota DPRD periode 2024-2029 dalam menjalankan masa jabatannya, yang secara alami diwarnai oleh dinamika politik nasional yang turut berimbas hingga ke tingkat daerah. Pergantian anggota dewan membawa semangat, orientasi,

serta strategi politik baru yang memengaruhi arah kebijakan dan pola komunikasi antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah.

Selain itu, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun yang sama menambah intensitas dinamika politik, karena hubungan antara calon kepala daerah dan anggota dewan sering kali memiliki kepentingan strategis dalam konteks pembangunan daerah. Kondisi ini menempatkan Sekretariat DPRD pada posisi yang cukup krusial, mengingat tugas dan fungsinya adalah memfasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota dewan secara profesional.

Dalam situasi politik yang dinamis tersebut, sekretariat harus mampu menjaga netralitas dan stabilitas administrasi agar kinerja kelembagaan tetap optimal. Tantangan ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan serta koordinasi yang adaptif terhadap perubahan konstelasi politik. Dengan demikian, tahun 2024 menjadi fase transisi penting yang menandai penyesuaian antara dinamika politik dan profesionalisme birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD.

3. Tidak tercapainya Target Raperda menjadi Perda

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 memutuskan sebanyak 16 Raperda yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 2024. Namun sampai dengan akhir tahun sidang hanya 10 Raperda yang berhasil ditetapkan persetujuannya oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Semarang. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya yakni 10 Raperda dari 16 Raperda yang di rencanakan. Raperda belum dapat mencapai target 16 Raperda yang direncanakan hal ini di sebabkan karena kurangnya kesiapan materi dari pengusul dan adanya perubahan per Undang-undangan dari tingkat pusat, di samping itu padatnya kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2026 mendatang :

a) Tantangan

1) Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD

Pada tahun kedua masa jabatan, anggota DPRD mulai mendalami fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara lebih substansial. Hal ini menuntut Sekretariat DPRD untuk menyediakan dukungan administratif, teknis, dan analitis yang semakin kompleks. Keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan menjadi tantangan utama dalam menjaga kualitas fasilitasi kerja dewan.

2) Sinkronisasi Program dengan Pemerintah Daerah

Janji-janji kampanye kepala daerah yang harus diwujudkan memerlukan sinergi erat antara eksekutif dan legislatif. Sekretariat DPRD menghadapi tantangan dalam mengoordinasikan agenda pembahasan kebijakan agar tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Keterlambatan atau perbedaan persepsi kebijakan dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang pro-rakyat.

3) Menjaga Netralitas dan Profesionalisme

Dengan meningkatnya intensitas politik di tahun kedua, terutama menjelang pelaksanaan program strategis kepala daerah, potensi tarik-menarik kepentingan politik semakin besar. Sekretariat DPRD harus mampu menjaga netralitas serta menjamin layanan administratif berjalan objektif dan transparan. Hal ini menjadi ujian profesionalisme dalam mengelola dinamika antara kepentingan politik dan kepentingan publik.

b) Peluang

1) Penguatan Kinerja Kelembagaan DPRD

Peningkatan kapasitas anggota DPRD memberikan peluang bagi Sekretariat untuk berperan aktif dalam memperkuat sistem dukungan kelembagaan, baik melalui riset kebijakan, peningkatan kualitas naskah akademik, maupun inovasi pelayanan. Kolaborasi yang erat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Hal ini memperkuat citra DPRD sebagai lembaga yang responsif dan solutif.

2) Sinergi Kebijakan Pro-Rakyat dengan Kepala Daerah

Tahun kedua menjadi momentum strategis untuk mewujudkan janji-janji kampanye kepala daerah melalui dukungan legislatif yang konstruktif. Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi komunikasi efektif antara walikota dan DPRD dalam perumusan kebijakan publik. Sinergi ini membuka peluang terciptanya program-program inovatif yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

3) Pemanfaatan Teknologi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi administrasi dan sistem informasi pemerintahan menjadi peluang besar bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kerja. Implementasi e-office, sistem informasi legislasi, dan basis data aspirasi publik dapat memperkuat kinerja lembaga. Dengan dukungan teknologi, Sekretariat DPRD mampu menjadi motor penggerak modernisasi birokrasi yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan.

4) Pengoptimalan fungsi JDIH Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Terdokumentasikannya peraturan-peraturan yang sistematis dan lengkap merupakan salah satu indikator tercapainya pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kota Semarang. Sehingga harapannya adalah JDIH

Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapat penghargaan dalam pengelolaan JDIH tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029 serta Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2026 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 adalah “Penguatan Sistem Pangan Kota Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. -> Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. -> Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan;

Prioritas Daerah 3. -> Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan kota;

Prioritas Daerah 4. -> Penguatan kualitas layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Prioritas Daerah 5. -> Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan;

Prioritas Daerah 6. -> Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Penanganan Banjir dan Rob, antara lain meliputi normalisasi Sungai Tenggang dan Sungai Sringin (pekerjaan fisik APBN), Sungai Plumbon (pekerjaan fisik drainase Muktiharjo Kidul), Normalisasi Sungai Silandak; Sub-system Sungai Tenggang – Sodor (rencana pembangunan fisik dari APBN), dan Sungai Babon (penanganan drainase kawasan Meteseh Dinar elok, dan penanganan drainase kawasan kramas Mulawarman Selatan); Rekondisi Kanal Lateral (Saluran Sabuk yang Menghubungkan Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur) berupa rehabilitasi saluran di sepanjang Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;

- b. Pengelolaan Sampah dan Limbah, antara lain meliputi Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; Peningkatan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah; Pemberdayaan Masyarakat (Bank Sampah, PKK, RT/RW, TPS3R/TPST) berupa pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah (kontainer, truk sampah, dan lain-lain); Kolaborasi Antar Warga (pembinaan proklamasi, pengembangan sekolah Adiwiyata, pengadaan sumur resapan); Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Jatibarang Semarang antara lain melalui pembangunan TPST kapasitas 480 ton/hari di TPA Jatibarang; Pembangunan IPAL/SPALDT berupa sosialisasi survey sambungan Rumah dan paket pekerjaan fisik dari APBN (pembangunan WWTP, pemasangan saluran pembuangan dari truk, pemasangan pipa saluran pembuangan air limbah, saluran air limbah area komersial, dan pengerjaan proyek konsultan pendukung),
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana, dengan rincian Pembangunan Kebun/Taman Hutan Raya yang meliputi AMDAL, Pembangunan Bangunan Konservasi DAS, pengadaan koleksi tumbuhan dan pembangunan sarana dan utilitas; Peningkatan kualitas lahan yang memenuhi standar lingkungan; Peningkatan upaya penghijauan wilayah; Penghijauan kembali wilayah hulu dan wilayah Daerah Aliran Sungai; Implementasi Delta Q Zero Run-off; Implementasi Biopori, Sumur Resapan, dan RWH; Pembangunan Sumur Pantek; Pengembangan Jaringan Irigasi; Pemeliharaan Sumur Air Tanah; pengembangan wisata berbasis ekologi; pemeliharaan dan pemasangan early warning system; pemasangan CCTV pompa banjir dan alat pengukur ketinggian rob; penguatan kapasitas KATANA dan satuan pendidikan aman bencana.
2. Penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan, dengan fokus pada Fasilitasi Petani Dan Peternak Untuk Penguatan Produksi Pangan Berbasis Potensi Lokal; Stabilisasi Harga Pangan Pokok, Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan, Kebijakan Penyerapan Produk Pangan Lokal Melalui BUMD/ BUMS/ Pengusaha Pangan Lainnya, Kampanye B2SA; Penanganan Keamanan Pangan; Penanganan Food Loss and Food Waste; Edukasi Dan Kampanye Gerakan Petani Cilik; Optimalisasi BUMS/KOMDA; Kampanye B2SA; Kerjasama Optimalisasi Lahan Pertanian Kritis Milik Pemerintah Kota Semarang; Fasilitasi Kegiatan dan Perizinan Petani Muda, Integrasi Pasar Murah antar OPD; Mitra Kios Pangan Berbasis Wilayah; Aplikasi marketplace untuk pemasaran produk pertanian, perikanan dan pangan; Urban Farming Hub; Perikanan Perkotaan; Social Fishery; Fasilitasi peningkatan produksi peternakan; Pengembangan Manajemen Pangan; Optimalisasi BUMS dan

BUMNel; Penataan kawasan sentra herbal; Peningkatan produksi komoditas herbal, Peningkatan nilai ekonomi produk komoditas herbal; Penumbuhan sentra budidaya perikanan; Peningkatan produksi perikanan

3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung penyelesaian permasalahan Kota, dengan fokus pada Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Wilayah, Perumahan dan Permukiman, dengan rincian Pembangunan Jalan dan Jembatan (antara lain Pembangunan Jembatan Klenteng Tay Kak Sie; Peningkatan Jembatan Puri Anjasmoro; Peningkatan Akses Jalan ke wilayah pinggiran; Pembangunan jalan penghubung Kelurahan Gedawang dan Kelurahan Jabungan, Jalan Kedung Begal, Jalan Empu Sendok, Peningkatan Jalan Akses Kampung Jawi (Jalan Bendosari - Jalan Kalialang Lama); Pembangunan Jalan Srandol – Sekaran (review DED); Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan BRT/New BRT yang rendah karbon melalui peningkatan kualitas layanan dan peremajaan armada BRT; Pengembangan Semarang Outer Ring Road (Peningkatan Jalan Segmen Sabhara – Ngadirgo); Peningkatan jumlah permukiman dengan akses air bersih dan sanitasi aman baik; Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; Pembangunan Tangki Septic Skala Individu; pemenuhan akses air minum yang aman dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas layanan dasar untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan Akses Dan Layanan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas, dengan rincian Perluasan program kepesertaan UHC; Pembangunan Puskesmas (Lanjutan Puskesmas Tlogosari Kulon, Puskesmas Karanganyar) dan Pustu (Pustu Cumi, Sendangmulyo dan Tanjung Mas); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita; Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya); Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil. Ibu bersalin, bayi baru lahir; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Integrasi literasi kesehatan mental; Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan.
 - b. Penguatan Penyediaan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Berkeadilan Dan Merata, dengan rincian Pengembangan sekolah swasta gratis; Penyelesaian ijazah yang tertahan; Peningkatan cakupan beasiswa gratis untuk masyarakat miskin, berprestasi dan atlet; Peningkatan kompetensi guru yang menguatkan kemampuan dalam menghadapi tuntutan masa depan, baik dari segi intelektual maupun karakter; Pembentukan dan penguatan sekolah adiwiyata; Penguatan pendidikan

karakter dan disiplin pelajar; Penyusunan, pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital.

- c. Penyediaan Ruang Aktifitas Dan Support System Untuk Kompetisi Olahraga, Seni, Budaya Dan Inovasi, dengan rincian Optimalisasi dan penambahan zona aktivitas gratis; Fasilitas untuk warga Kota Semarang yang berprestasi; Fasilitas penyelenggaraan kompetisi olahraga olahraga, seni, budaya dan inovasi; Fasilitas pengembangan inkubasi bisnis; Penguatan ekosistem inovasi dan teknologi melalui pendampingan, asistensi, dan pemberian apresiasi pada inovator muda; Penambahan ruang publik untuk aktivitas dan apresiasi seni budaya.
 - d. Penguatan Perlindungan Sosial Untuk Menciptakan Ketahanan Sosial Yang Berkelanjutan, dengan rincian Penguatan layanan publik gratis dari dalam kandungan hingga meninggal; Optimalisasi dan pembangunan Rumah Inspirasi; Penyediaan panti asuhan bagi anak terlantar, berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo, dan rumah singgah; Pengembangan panti asuhan bagi anak terlantar; Perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk kelompok rentan; Pengembangan Rumah Autis Menjadi Rumah Layanan Penyandang Disabilitas; Penguatan perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
5. Peningkatan penyediaan sarana, prasarana dan aktivitas penunjang perekonomian kota yang berkeadilan, dengan fokus pada Pengembangan Pasar Tradisional Modern dengan Mengintegrasikan Fungsi Lainnya dengan rincian Rehab Fisik Ruang Tambah Fungsi untuk usaha lain seperti: sarpras OR, Creative Hub, Pusat Seni Budaya, Pusat Kuliner/ Foodcourt, Pusat Oleh-oleh (Penyusunan DED untuk 3 pasar, yaitu Pasar Bulu, Pasar Kanjengan dan SCJ); Pelibatan pelaku usaha dalam event kreatif tahunan di pasar; Kegiatan pembinaan dan fasilitas pasar insidentil (tiban); Rehab Pasar Ngaliyan; Penyiapan dokumen administrasi Kelengkapan Pembangunan Pasar Induk Kota Semarang; Pemilihan dan penunjukan pihak ketiga pengelola pasar; dan Fasilitas, Apresiasi dan kompetisi seni budaya. Fokus Penguatan UMKM dan Koperasi dengan rincian Rehab Pembinaan feasibility Pelaku Usaha dan Koperasi dalam akses kredit; Pengembangan PLUT KUMKM; Penyediaan ruang klinik bisnis produk berstandar export/ Internasional (mempermudah akses bagi importir LN); Pelatihan Digital Marketing scale-up; dan Penguatan implementasi Koperasi Merah Putih. Fokus Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian Kerjasama penyelenggaraan event dengan promotor profesional serta business matching dengan promotor; Penyusunan dokumen IPRO, Perda Penanaman Modal, Investment Development Brief, pengembangan platform

peta Investasi, fasilitasi kemitraan usaha; Pembangunan sarpras dan pelaksanaan event hiking lokal; Penyusunan Kajian, FS, DED Pengembangan Desa Wisata Ekologi Terintegrasi; Penguatan wawasan pelaku usaha UMKM terkait hospitality dan pariwisata Kota Semarang; dan Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui penguatan kelembagaan, festival industri kreatif, optimalisasi sarpras Creative hub, fasilitasi bantuan HaKI pelaku usaha.

6. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap permasalahan Kota, dengan fokus pada Penguatan Riset dan Inovasi Daerah Sebagai Support System Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inoovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda. Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pendapatan Daerah dengan rincian Peningkatan Pajak dan retribusi daerah yang berkeadilan melalui penguatan basis data potensi pajak dan retribusi; Penguatan jejaring dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan potensi penerimaan dana transfer ke daerah; Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan Penagihan piutang pajak dengan melibatkan mitra-mitra serta Aparat Penegak Hukum (kejaksaan) dan Tim Korsupgah KPK. Fokus Peningkatan Kualitas Manajemen Tata Kelola Pemerintahan dengan rincian Peningkatan implementasi Sistem Merit dalam manajemen ASN; Penguatan SPBE, terutama dalam pemanfaatan big data analytic untuk menunjang tata kelola pemerintahan; dan Pengembangan sistem spasial terintegrasi sebagai bahan pengambilan kebijakan pengembangan Kota. Fokus Peningkatan Peran Serta Aktif Masyarakat Dalam Mendukung Pencapaian Kinerja Pemerintahan dengan rincian Optimalisasi Forum CSR dan sumber non APBD lainnya yang berasal dari lembaga/organisasi masyarakat; Peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; Pemberian penghargaan dan apresiasi Pengarusutamaan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Semarang melalui penguatan BRIDA; Pengembangan jejaring kolaborasi riset dan inovasi; Fasilitasi Forum HAKI; dan Fasilitasi Support System inovator muda.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2026 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut berdasarkan target pada RPJMD:

- | | | |
|----|------------------------------|----------------|
| 1. | Laju Pertumbuhan Ekonomi | : 5,90 – 6,30% |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka | : 5,40-5,10% |

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 86,25
4. Tingkat Kemiskinan : 3,86-3,74%

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,8 – 6,3%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 2. 2
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
4.02	4.02 SEKRETERIAT DPRD				122.696.639.475	4.02 SEKRETERIAT DPRD				122.696.639.475	
4.02.02	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49.684.997.184	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49.684.997.184	
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan	95,3	38.066.389.352	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan	95,3	38.066.389.352	
4.02.02.2.01	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				21.449.318.530	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				21.449.318.530	
	Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda yang dibahas	80,00%	21.449.318.530	Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Perda yang dibahas	80,00%	21.449.318.530	
4.02.02.2.01.0002	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20.143.559.340	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20.143.559.340	

	Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	20.143.559.340	Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	20.143.559.340	
4.02.02.2.01.0003	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.305.759.190	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.305.759.190	
	Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	8 dokumen	1.305.759.190	Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	8 dokumen	1.305.759.190	
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.688.000.000	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.688.000.000	
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	4.688.000.000	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	4.688.000.000	
4.02.02.2.04.0002	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				-	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				-	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dokumen	-	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dokumen	-	
4.02.02.2.04.0004	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.688.000.000	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.688.000.000	
	Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Kota Semarang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 orang	4.688.000.000	Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Kota Semarang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 orang	4.688.000.000	

4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				11.929.070.822	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				11.929.070.822	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD		Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	92,00%	11.929.070.822	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD		Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	92,00%	11.929.070.822	
4.02.02.2.08.0001	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				11.929.070.822	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				11.929.070.822	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	11.929.070.822	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 dokumen	11.929.070.822	
	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	95,3	4.068.914.507	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD		Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan	95,3	4.068.914.507	
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				3.836.075.300	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				3.836.075.300	
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	3.836.075.300	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD	95,60%	3.836.075.300	
4.02.02.2.04.0006	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2.855.575.300	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2.855.575.300	

	Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 laporan	2.855.575.300	Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 laporan	2.855.575.300	
4.02.02.2.04.0008	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				980.500.000	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				980.500.000	
	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 laporan	980.500.000	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 laporan	980.500.000	
4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				2.328.349.207	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				2.328.349.207	
	Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	92,00%	2.328.349.207	Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	92,00%	2.328.349.207	
4.02.02.2.08.0004	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.328.349.207	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.328.349.207	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	2.328.349.207	Meningkatnya kualitas pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 dokumen	2.328.349.207	
	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	81	7.549.693.325	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat		Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti	81	7.549.693.325	
4.02.02.2.05	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				7.549.693.325	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				7.549.693.325	

	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	85,50%	7.549.693.325	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan	85,50%	7.549.693.325	
4.02.02.2.05.0002	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				22.482.600	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				22.482.600	
	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	1 dokumen	22.482.600	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	1 dokumen	22.482.600	
4.02.02.2.05.0003	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				7.527.210.725	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				7.527.210.725	
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	7.527.210.725	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 dokumen	7.527.210.725	
4.02.01	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				73.011.642.291	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				73.011.642.291	
	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	58.023.785.220	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	95	58.023.785.220	
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.105.620	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				81.105.620	

	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	81.105.620	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	81.105.620	
4.02.01.2.01.0001	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.496.000	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	8.496.000	
4.02.01.2.01.0002	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600	
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	
4.02.01.2.01.0003	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600	

	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	
4.02.01.2.01.0004	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200	
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	9.806.200	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	9.806.200	
4.02.01.2.01.0005	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600	
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.852.600	
4.02.01.2.01.0008	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				45.245.620	

	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	45.245.620	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	45.245.620	
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000	
	Tersedianya pelaporan kinerja Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	20.271.000	Tersedianya pelaporan kinerja Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	20.271.000	
4.02.01.2.01.0007	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000	
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	20.271.000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	20.271.000	
4.02.01.2.02	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.751.732.600	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.751.732.600	
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100,00%	8.751.732.600	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100,00%	8.751.732.600	

4.02.01.2.02.0001	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.326.890.000	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.326.890.000	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	8.326.890.000	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	8.326.890.000	
4.02.01.2.02.0002	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				417.120.000	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				417.120.000	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	417.120.000	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	417.120.000	
4.02.01.2.02.0005	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.385.000	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.385.000	
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.385.000	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.385.000	

4.02.01.2.02.0007	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Sema rang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD	1 laporan	3.817.200	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Sem aran g	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lana n/Semesteran SKPD	1 laporan	3.817.200	
4.02.01.2.02.0008	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.520.400	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.520.400	
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Sema rang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1.520.400	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Sem aran g	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1.520.400	
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000	

	Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	49.170.676.000	Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	49.170.676.000	
4.02.01.2.15.0001	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000	
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Kota Semarang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	49.170.676.000	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Kota Semarang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	49.170.676.000	
	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD	95,50	13.196.331.071	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas		Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD	95,50	13.196.331.071	
4.02.01.2.03	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000	
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	70.000.000	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	70.000.000	
4.02.01.2.03.0002	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000	

	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	70.000.000	
4.02.01.2.05	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				384.752.000	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				384.752.000	
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	100,00%	384.752.000	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik	100,00%	384.752.000	
4.02.01.2.05.0003	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000	
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	7.752.000	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	7.752.000	
4.02.01.2.05.0011	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				377.000.000	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				377.000.000	

	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	377.000.000	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	377.000.000	
4.02.01.2.06	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.815.441.619	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.815.441.619	
	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana kantor untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik	100,00%	1.481.055.046	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana kantor untuk menunjang kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik	100,00%	1.481.055.046	
4.02.01.2.06.0004	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				546.246.304	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				546.246.304	
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	546.246.304	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	546.246.304	
4.02.01.2.06.0005	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				268.834.877	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				268.834.877	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	268.834.877	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	268.834.877	

4.02.01.2.06.0011	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				665.973.865	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				665.973.865	
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 laporan	665.973.865	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 laporan	665.973.865	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	100%	1.155.662.773	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik	100%	1.155.662.773	
4.02.01.2.06.0006	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750	
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	156.470.750	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	156.470.750	
4.02.01.2.06.0009	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				999.192.023	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				999.192.023	

	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	999.192.023	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	999.192.023	
	Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	100,00%	3.178.723.800	Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik	100,00%	3.178.723.800	
4.02.01.2.06.0008	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.178.723.800	4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.178.723.800	
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.178.723.800	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	3.178.723.800	
4.02.01.2.07	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.996.145	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.996.145	
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)		Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	142.996.145	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)		Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	100,00%	142.996.145	

4.02.01.2.07.0001	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	
	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	0 unit	-	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	0 unit	-	
4.02.01.2.07.0002	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000	
	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	450.000	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	450.000	
4.02.01.2.07.0006	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.546.145	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.546.145	
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 unit	142.546.145	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 unit	142.546.145	
4.02.01.2.08	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.826.253.600	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.826.253.600	

	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	3.826.253.300	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00%	3.826.253.300	
4.02.01.2.08.0002	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.998.500	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.998.500	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	99.998.500	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	99.998.500	
4.02.01.2.08.0003	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.698.728	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.698.728	
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	150.698.728	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	150.698.728	
4.02.01.2.08.0004	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.556.372	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.556.372	

	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.575.556.372	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.575.556.372	
4.02.01.2.09	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.466.611.058	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.466.611.058	
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	1.151.622.000	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	1.151.622.000	
4.02.01.2.09.0001	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.688.000	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.688.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	199.688.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	199.688.000	

4.02.01.2.09.0002	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				666.457.000	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				666.457.000	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	666.457.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	666.457.000	
4.02.01.2.09.0009	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.477.000	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.477.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	285.477.000	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	285.477.000	
	Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	314.989.058	Terpeliharanya Sarana Prasana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD		Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan	92,50%	314.989.058	
4.02.01.2.09.0006	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.989.058	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.989.058	

	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	155.989.058	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	248 unit	155.989.058	
4.02.01.2.09.0011	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.000.000	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.000.000	
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	159.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	159.000.000	
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.185.992.649	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.185.992.649	
	Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	95,50%	1.185.992.649	Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	95,50%	1.185.992.649	
4.02.01.2.15.0002	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.302.649	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.302.649	
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	1.107.302.649	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	1.107.302.649	

4.02.01.2.15.0003	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				78.690.000	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				78.690.000	
	Terlaksananya medical checkup DPRD	Kota Semarang	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	50 orang	78.690.000	Terlaksananya medical checkup DPRD	Kota Semarang	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	50 orang	78.690.000	
4.02.01.2.16	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				300.000	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				300.000	
	Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD		Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD	100,00%	300.000	Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD		Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD	100,00%	300.000	
4.02.01.2.16.0004	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	300.000	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	300.000	x

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang didapat melalui mekanisme konsultasi publik, forum OPD dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama. Proses perencanaan pembangunan Tahun 2025, masukan-masukan dari DPRD pada prinsipnya, setiap substansi dalam pokok-pokok pikiran DPRD terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 akan menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen, dan akan dituangkan dalam Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang dilaksanakan oleh para Anggota Dewan dalam bentuk pelaksanaan Reses. Adapun tujuan kegiatan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Hasil pelaksanaan reses DPRD merupakan sarana strategis dalam menjaring aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD. Aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses tersebut selanjutnya dihimpun, diklasifikasikan, dan dirumuskan menjadi usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagai bentuk penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Usulan Pokir DPRD ini menjadi salah satu bahan masukan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang perlu diakomodasi secara terarah dan berkelanjutan.

Dari beberapa usulan yang telah dikompilasi mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam, meliputi bidang kesehatan, lingkungan, infrastruktur, kebencanaan, hingga penyediaan fasilitas umum. Aspirasi yang dihimpun antara lain mencakup permohonan bantuan alat kesehatan untuk mendukung kegiatan posyandu, posyandu lansia, serta penyediaan sarana pengelolaan sampah organik dan nonorganik. Selain itu, terdapat usulan penanganan banjir di wilayah Tlogosari Kulon, pembangunan lapangan olahraga, serta penanganan permasalahan lingkungan seperti banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang jalan dan perlunya penataan taman agar fungsi lingkungan dapat kembali optimal.

Lebih lanjut, aspirasi masyarakat terkait peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik, antara lain permohonan pengecoran jalan lingkungan dengan panjang tertentu, pemasangan penerangan jalan umum di beberapa wilayah, serta penyediaan fasilitas bermain anak sebagai upaya mendukung terwujudnya kota layak anak. Seluruh aspirasi dari masing-masing Anggota Dewan menjadi bahan masukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, karena merepresentasikan kebutuhan dan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat di masing-masing wilayah.

Seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah dirumuskan kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan kompilasi, verifikasi, dan sinkronisasi dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara aspirasi masyarakat dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, usulan Pokir DPRD yang telah terkompilasi akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan bidang urusan, kewenangan, dan jenis usulan yang diajukan, serta diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada Gambar 3.1.



2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 diarahkan pada “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam tiga prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter..

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang Tahun 2025

URAIAN	LPE	IPM	Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,90 – 6,30%	86,25	3,86 – 3,74%	5,40 – 5,10%

Prov. Jateng	5,00 – 6,00%	0,61 (IMM)	8,70 – 8,53%	4,71 – 4,27%
Pusat	5,30 – 5,70%	0,57 (IMM)	6,50 – 7,50 %	5,00 – 4,96%

Sumber: RKPD Kota Semarang Tahun 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pelaksanaan awal dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD yang kemudian menjadi tujuan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026, adalah :

“Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut adalah ”Persentase Raperda menjadi Perda”

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Renja tersebut, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut adalah

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dengan Indikator Sasaran yaitu
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD

Dengan indikator Sasaran yaitu Persentase Raperda yang disetujui DPRD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 yaitu sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5
Meningkatnya kapasitas kinerja Anggota DPRD		Persentase Raperda menjadi Perda	Persen	88,90%
	Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	82%
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	80,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	95,60

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2026, dimana RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMN, RPMJD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
2. Mempedomani Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025-2029;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2030. Secara umum Sekretariat DPRD memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
4. Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan di tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2026 sebanyak 2 (dua) program yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran tahun 2026 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan 44 (empat puluh satu) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan rutin dan 9 (Sembilan) sub kegiatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 sebesar Rp 122.696.639.475 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Adapun rencana dan kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02	4.02 SEKRETERIAT DPRD				122.696.639.475				151.194.751.589
4.02.02	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				49.684.997.184				68.030.023.592
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan perundang-undangan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Persidangan dan Perundangan-undangan		95,3	38.066.389.352			95,75	50.385.435.679
4.02.02.2.01	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				21.449.318.530				22.304.302.487
	Meningkatnya kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang dibahas		80,00%	21.449.318.530			80,00%	22.304.302.487
4.02.02.2.01.0002	4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				20.143.559.340	PAD			20.207.772.191
	Meningkatnya kualitas pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Semarang	10 dokumen	20.143.559.340			10 dokumen	20.207.772.191
4.02.02.2.01.0003	4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan				1.305.759.190	PAD			2.096.530.296
	Meningkatnya kualitas kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	Kota Semarang	8 dokumen	1.305.759.190			8 dokumen	2.096.530.296

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				4.688.000.000				1.542.038.192
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD		95,60%	4.688.000.000			95,75%	1.542.038.192
4.02.02.2.04.0002	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD				-	PAD			997.121.457
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Semarang	1 dokumen	-			1 dokumen	997.121.457
4.02.02.2.04.0004	4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4.688.000.000	PAD			1.542.038.192
	Meningkatnya kualitas kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Semarang	20 orang	4.688.000.000			20 orang	1.542.038.192
4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				11.929.070.822				26.539.095.001
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Persentase terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		92,00%	11.929.070.822			93,00%	26.539.095.001
4.02.02.2.08.0001	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				11.929.070.822	PAD			26.539.095.001
	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Semarang	12 dokumen	11.929.070.822			12 dokumen	26.539.095.001

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas layanan keprotokolan dan kehumasan dalam mendukung kinerja DPRD	Nilai kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keprotokolan dan kehumasan		95,3	4.068.914.507			95,75	7.911.082.781
4.02.02.2.04	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				3.836.075.300				4.511.790.611
	Meningkatnya kualitas peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD		95,60%	3.836.075.300			95,75%	4.511.790.611
4.02.02.2.04.0006	4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2.855.575.300	PAD			3.405.994.986
	Terlaksananya kegiatan hubungan masyarakat sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Semarang	12 laporan	2.855.575.300			12 laporan	3.405.994.986
4.02.02.2.04.0008	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD				980.500.000	PAD			1.105.795.625
	Terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD sesuai ketentuan.	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Semarang	12 laporan	980.500.000			12 laporan	1.105.795.625
4.02.02.2.08	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				2.328.349.207				3.399.292.170
	Terlaksananya fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		92,00%	2.328.349.207			93,00%	3.399.292.170
4.02.02.2.08.0004	4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.328.349.207	PAD			3.399.292.170
	Terlaksananya pelaksanaan fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kota Semarang	12 dokumen	2.328.349.207			12 dokumen	3.399.292.170

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas layanan penyerapan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti		81	7.549.693.325			82,25	9.733.505.132
4.02.02.2.05	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				7.549.693.325				9.733.505.132
	Meningkatnya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase hasil dokumen aspirasi masyarakat yang diusulkan		85,50%	7.549.693.325			86,00%	9.733.505.132
4.02.02.2.05.0002	4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD				22.482.600	PAD			161.288.696
	Tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok DPRD yang disusun	Kota Semarang	1 dokumen	22.482.600			1 dokumen	161.288.696
4.02.02.2.05.0003	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses				7.527.210.725	PAD			9.572.216.436
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Semarang	150 dokumen	7.527.210.725			150 dokumen	9.572.216.436
4.02.01	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				73.011.642.291				83.164.727.997
	Terwujudnya perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase Perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Sekretariat DPRD yang berkualitas		95	58.023.785.220			95,50	64.561.427.506
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan				81.105.620				90.297.931

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Tersedianya acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase perencanaan sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00 %	81.105.620			100,00 %	90.297.931
4.02.01.2.01.0001	4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.496.000	PAD			9.458.916
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	8.496.000			3 dokumen	9.458.916
4.02.01.2.01.0002	4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.852.600	PAD			6.515.919
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.852.600			1 dokumen	6.515.919
4.02.01.2.01.0003	4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.852.600	PAD			6.515.919

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.852.600			1 dokumen	6.515.919
4.02.01.2.01.0004	4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				9.806.200	PAD			10.917.611
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	9.806.200			1 dokumen	10.917.611
4.02.01.2.01.0005	4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				5.852.600	PAD			6.515.919
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	5.852.600			1 dokumen	6.515.919
4.02.01.2.01.0008	4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah				45.245.620	PAD			50.373.647
	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Kota Semarang	1 dokumen	45.245.620			1 dokumen	50.373.647

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.01	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.271.000				22.568.465
	Tersedianya pelaporan kinerja Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pelaporan kinerja sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00 %	20.271.000			100,00 %	22.568.465
4.02.01.2.01.0007	4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				20.271.000	PAD			22.568.465
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	6 laporan	20.271.000			6 laporan	22.568.465
4.02.01.2.02	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.751.732.600				9.705.001.778
	Terwujudnya tertib administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100,00 %	8.751.732.600			100,00 %	9.705.001.778
4.02.01.2.02.0001	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.326.890.000	DAU PAD			9.319.276.045
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	50 orang	8.326.890.000			50 orang	9.319.276.045
4.02.01.2.02.0002	4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				417.120.000	PAD			376.653.702

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12 dokumen	417.120.000			12 dokumen	376.653.702
4.02.01.2.02.0005	4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.385.000	PAD			2.544.533
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1 laporan	2.385.000			1 laporan	2.544.533
4.02.01.2.02.0007	4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.817.200	PAD			3.982.965
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	1 laporan	3.817.200			1 laporan	3.982.965
4.02.01.2.02.0008	4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.520.400	PAD			2.544.533

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 laporan	1.520.400			1 laporan	2.544.533
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				49.170.676.000				54.743.559.331
	Terwujudnya tertib layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Keuangan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00 %	49.170.676.000			100,00 %	54.743.559.331
4.02.01.2.15.0001	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				49.170.676.000	PAD			54.743.559.331
	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Semarang	50 orang	49.170.676.000			50 orang	54.743.559.331
	Terwujudnya pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD yang berkualitas	Persentase kinerja pelayanan umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD		95,50	13.196.331.071			95,50	18.603.300.491
4.02.01.2.03	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				70.000.000				77.933.628
	Terwujudnya tertib administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00 %	70.000.000			100,00 %	77.933.628

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.03.0002	4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				70.000.000	PAD			77.933.628
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	70.000.000			1 dokumen	77.933.628
4.02.01.2.05	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				384.752.000				602.039.500
	Terwujudnya layanan kepegawaian yang berkualitas dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang Berjalan Baik		100,00 %	384.752.000			100,00 %	602.039.500
4.02.01.2.05.0003	4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7.752.000	PAD			8.630.593
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	12 dokumen	7.752.000			12 dokumen	8.630.593
4.02.01.2.05.0011	4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				377.000.000	PAD			593.408.907
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	50 orang	377.000.000			50 orang	593.408.907

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.06	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				5.815.441.619				6.667.181.377
	Terpenuhinya penyediaan sarana prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Sarana prasarana yang Berjalan Baik		100,00 %	1.481.055.046			100,00 %	2.098.633.358
4.02.01.2.06.0004	4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				546.246.304	PAD			835.003.153
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 paket	546.246.304			12 paket	835.003.153
4.02.01.2.06.0005	4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				268.834.877	PAD			327.647.200
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	12 paket	268.834.877			12 paket	327.647.200
4.02.01.2.06.0011	4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				665.973.865	PAD			935.983.005
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	1 laporan	665.973.865			1 laporan	935.983.005

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Berjalan Baik		100%	1.155.662.773			100%	1.451.202.915
4.02.01.2.06.0006	4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				156.470.750	PAD			174.204.759
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	1 dokumen	156.470.750			1 dokumen	174.204.759
4.02.01.2.06.0009	4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				999.192.023	PAD			1.276.998.155
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	999.192.023			12 laporan	1.276.998.155
	Terpenuhinya pelayanan administrasi pendukung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Administrasi pendukung yang Berjalan Baik		100,00 %	3.178.723.800			100,00 %	3.117.345.105
4.02.01.2.06.0008	4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu				3.178.723.800	PAD			3.117.345.105
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	3.178.723.800			12 laporan	3.117.345.105

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.07	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				142.996.145				4.005.063.248
	Terpenuhinya kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menunjang pelaksanaan kegiatan (OPD)	Persentase pengadaan BMD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD yang sesuai peraturan perundangan		100,00 %	142.996.145			100,00 %	4.005.063.248
4.02.01.2.07.0001	4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-	PAD			700.000.000
	Tersedianya kendaraan dinas jabatan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas jabatan yang Disediakan	Kota Semarang	0 unit	-			1 unit	700.000.000
4.02.01.2.07.0002	4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000	PAD			2.369.293.080
	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang berkualitas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Semarang	3 unit	450.000			3 unit	2.369.293.080
4.02.01.2.07.0006	4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				142.546.145	PAD			935.770.168
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	55 unit	142.546.145			55 unit	935.770.168

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.08	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.826.253.600				4.092.908.877
	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang untuk mendukung penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat kepada Sekretariat DPRD	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100,00 %	3.826.253.300			100,00 %	4.092.908.877
4.02.01.2.08.0002	4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.998.500	PAD			110.371.759
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	99.998.500			12 laporan	110.371.759
4.02.01.2.08.0003	4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				150.698.728	PAD			450.901.703
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	12 laporan	150.698.728			12 laporan	450.901.703
4.02.01.2.08.0004	4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.575.556.372	PAD			3.531.635.415
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	3.575.556.372			12 laporan	3.531.635.415

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.02.01.2.09	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.466.611.058				1.756.704.569
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Gedung untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Gedung kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan		92,50%	1.151.622.000			92,50%	1.322.168.928
4.02.01.2.09.0001	4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				199.688.000	PAD			383.016.611
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	9 unit	199.688.000			9 unit	383.016.611
4.02.01.2.09.0002	4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				666.457.000	PAD			716.484.810

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	39 unit	666.457.000			39 unit	716.484.810
4.02.01.2.09.0009	4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				285.477.000	PAD			211.868.133
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 unit	285.477.000			1 unit	211.868.133
	Terpeliharanya Sarana Prasarana Kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD	Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana kantor Sekretariat DPRD sesuai ketentuan		92,50%	314.989.058			92,50%	434.535.641
4.02.01.2.09.0006	4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				155.989.058	PAD			222.667.507
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	248 unit	155.989.058			248 unit	222.667.507
4.02.01.2.09.0011	4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				159.000.000	PAD			222.667.507

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	100 unit	159.000.000			100 unit	222.667.507
4.02.01.2.15	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				1.185.992.649				1.399.465.285
	Terwujudnya tertib layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan	Persentase layanan Kesejahteraan DPRD yang sesuai peraturan perundangan		95,50%	1.185.992.649			95,50%	1.399.465.285
4.02.01.2.15.0002	4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				1.107.302.649	PAD			1.232.464.654
	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Semarang	6 paket	1.107.302.649			6 paket	1.232.464.654
4.02.01.2.15.0003	4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				78.690.000	PAD			167.000.631
	Terlaksananya medical checkup DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check up DPRD	Kota Semarang	50 orang	78.690.000			50 orang	167.000.631
4.02.01.2.16	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				300.000				2.004.008
	Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi DPRD	Prosentase ketertiban pelayanan administrasi DPRD		100,00 %	300.000			100,00 %	2.004.008
4.02.01.2.16.0004	4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				300.000	PAD			2.004.008

Kode Rekening	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Ketua DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	300.000			1 paket	2.004.008

4.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026 yang merupakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai tahun 2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. IKU Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
SEKRETARIAT DPRD			
1	Indikator Tujuan : Persentase Reperda Menjadi Perda	Persen	88,9
2	Indikator Sasaran 1 Persentase Raperda yang disetujui DPRD	Persen	82
3	Indikator Sasaran 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD	Angka	80,35
	Indikator Sasaran 2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Angka	95,60

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran operasional atau taktis untuk memantau capaian kegiatan dan output yang mendukung pencapaian IKU.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)
1	Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD dalam fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	100	

BAB V

PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029;
3. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2026, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Keputusan DPRD Kota Semarang dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2026;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program - program pemerintah daerah perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara DPRD dengan OPD di Kota Semarang agar kegiatan dapat terlaksana dengan optimal;

2. Memacu percepatan pembahasan Raperda, baik kepada Pansus maupun kepada Eksekutif untuk secepatnya mengirim naskah Raperda untuk dibahas.
3. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
4. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026

Dengan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan, konsistensi dan keberlanjutan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Semarang. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2026.

Semarang, Desember 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG



MOCH IMRON, SH, MH.
Pembina Utama Muda/ (IV-c)
NIP 196701101986031003



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda 146 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang 50132
Telp. (024) 35536335 Psw.1211 Fax (024) 3547146

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG

NOMOR : 900.1.1.2/064 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Semarang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 91);
22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 46);
23. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 49);
24. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan anggota tim mengenai persiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja
- b. Melaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2026

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kota Semarang Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 24 Oktober 2025 .

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG,



MOCH IMRON

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG**

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

Nomor : 300.1.1.2/064 Tahun 2025

Tanggal : 24 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD
KOTA SEMARANG TAHUN 2026**

NO	NAMA JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Ketua
3	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Anggota
5	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
6	Subkoordinator Persidangan	Anggota
7	Subkoordinator Kajian Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8	Subkoordinator Risalah	Anggota
9	Subkoordinator Program dan Anggaran	Anggota
10	Subkoordinator Pemberitaan	Anggota
11	Subkoordinator Peliputan dan Dokumentasi	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
15	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Aset	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Protokol	Anggota
18	Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG



MUHAMMAD IMRON